

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024



**#bangga
melayani
bangsa**

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen Pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam sistem AKIP, keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Diskominfo 2021-2026. Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan Penyusunan Laporan di tahun yang akan datang. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Januari 2025
Kepala Dinas,

Ir. Siti Aisyah, M.Si
Pembina Utama Madya/ (IV/c)
NIP. 19670928 199203 2 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
 Bab I Pendahuluan	 4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Gambaran Umum	4
1.3 Penghargaan	5
1.4 Kewenangan dan Data Umum Organisasi	5
1.5 Sistematika Penulisan	11
 Bab II Perencanaan Kinerja	 13
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Perencanaan Kinerja	17
 Bab III Akuntabilitas Kinerja	 19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	19
3.2 Realisasi Keuangan	26
3.2 Capaian Pelaksanaan RB General	27
 Bab IV Penutup	 28
4.1 Kesimpulan	28
4.2 Saran dan Rekomendasi	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi Jabatan Fungsional Diskominfo	7
Tabel 1.2 Distribusi Pegawai berdasarkan Bidang	8
Tabel 1.3 Distribusi Pegawai berdasarkan Jabatan dan Golongan	9
Tabel 1.4 Distribusi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	10
Tabel 1.5 Distribusi Pegawai berdasarkan Pendidikan	11
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Program, dan Target Kinerja Jangka Menengah	15
Tabel 2.2 Target Perjanjian Kinerja 2024	17
Tabel 2.3 Program dan Anggaran 2024	18
Tabel 3.1 Capaian Kinerja 2024	19
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024	20
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Renstra	22
Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja 2024	23
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan 2024	26
Tabel 3.6 Capaian Pelaksanaan RB General	27

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo, diawali dengan penetapan target kinerja yang akan dicapai yang diperjanjikan antara Kepala Diskominfo dengan Gubernur Sumatera Barat. Sedangkan untuk dapat mengetahui seberapa besar kinerja Diskominfo Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh, serta melakukan analisa terhadap tingkat pencapaian target yang direncanakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

Salah satu bentuk penilaian dan bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan kinerja instansi yang telah direncanakan dan disepakati adalah dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Perpres ini kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

I.2. GAMBARAN UMUM

Diskominfo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan mengalami perubahan terakhir melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Uraian tugas Diskominfofik ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, pada tahun 2024 Diskominfofik didukung oleh 123 orang aparatur yang terdiri dari 49 orang PNS, 19 orang PPPK, 23 orang tenaga IT, 9 orang tenaga ahli di Komisi Informasi (5 orang Komisioner dan 4 orang asisten ahli), dan 22 orang pegawai outsourcing.

Anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Diskominfofik pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.36.509.759.008,- yang dipergunakan untuk membiayai 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan.

I.3. PENGHARGAAN

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh penghargaan dari 2 (dua) kementerian, yakni KemenpanRB dan Kemenkominfo. Penghargaan yang diperoleh dari KemenpanRB yakni Digital Government SPBE Summit Kategori Pencapaian Indeks SPBE terbaik pada Kategori Provinsi yang diterima Gubernur di Istana Negara pada tanggal 27 Mei 2024. SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dimana penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghantarkan layanan kepada pengguna layanan.

Penghargaan selanjutnya berasal dari Kemenkominfo berkaitan dengan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 kategori Early Adopter Award yang diterima pada tanggal 10 September 2024. IMDI merupakan proksi pengukuran transformasi digital di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan asas perencanaan imperatif pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPD Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat periode 2025-2045. IMDI merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Adapun pilar IMDI adalah: Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, dan Pekerjaan.

I.4. KEWENANGAN DAN DATA UMUM ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik, dan bidang Persandian, Diskominfofik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk menjalankan Tugas pokok dan Fungsinya tersebut Diskominfo dikonstruksikan dengan struktur yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sekretaris
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 - Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
- d. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari :
 - Kabid Aplikasi Informatika
- e. Bidang Statistik Sektor, terdiri dari :
 - Kabid Statistik Sektor
- f. Bidang Siber dan Sandi
 - Kabid Siber dan Sandi
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Distribusi jabatan fungsional di Diskominfo dan memperhatikan Keputusan Menteri RB nomor 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan dalam Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah untuk Diskominfo adalah sebagai berikut:

Tabel I.1 Distribusi Jabatan Fungsional Diskominfo

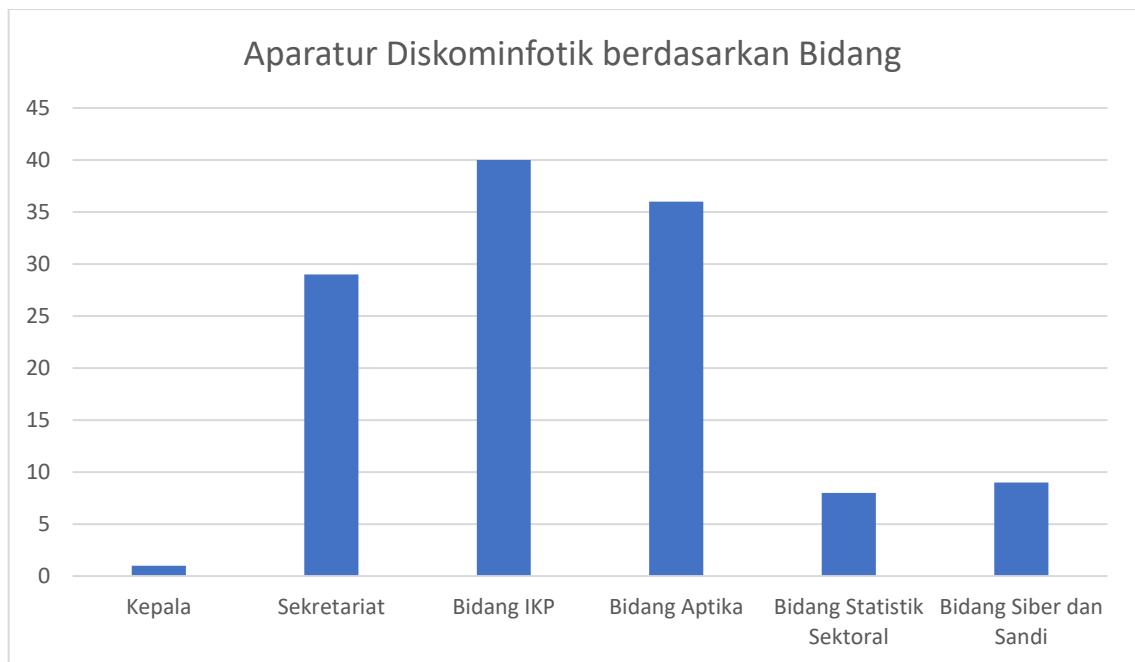
No	Bidang	Jenis JF	Ketersediaan	
			Ada	Tidak Ada
1	Sekretariat	- Analis Kebijakan - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur/Analis SDM Aparatur - Arsiparis - Pranata Komputer - Pranata Hubungan Masyarakat - Perencana - Analis Keuangan Pusat/ Daerah - Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa - Perancang Peraturan Perundang-undangan	√	√ √ √ √ √ √ √ √
2	Bidang IKP	Pranata Hubungan Masyarakat	√	
3	Bidang Aptika	- Pranata Komputer - Penata Kelola Informatika SPBE	√	√
4	Bidang Statistik Sektoral	Statistisi	√	
5	Bidang Siber dan Sandi	- Sandiman - Manggala Informatika - Pranata Komputer	√ √	√

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Diskominfo didukung oleh personil berjumlah 123 orang dengan komposisi:

- a. Jumlah pegawai berdasarkan Bidang

Tabel 1.2 Distribusi Pegawai berdasarkan Bidang

No.	Bagian / Bidang	Golongan				PPPK	Tenaga IT	Tenaga Ahli	Pegawai Outsourcing	Jumlah
		IV	III	II	I					
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-		-	1
2.	Sekretariat	1	12	-	-	-	-		16	29
3.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	9	1	-	6	8		-	25
	Komisi Informasi	-	-	-	-	-	-	9	6	15
4.	Bidang Aplikasi Informatika	1	10	2	-	10	13		-	36
5.	Bidang Statistik Sektoral	1	5	-	-	2	-		-	8
6.	Bidang Siber dan Sandi	1	5	-	-	1	2		-	9
	Jumlah	6	41	3	-	19	23	9	22	123

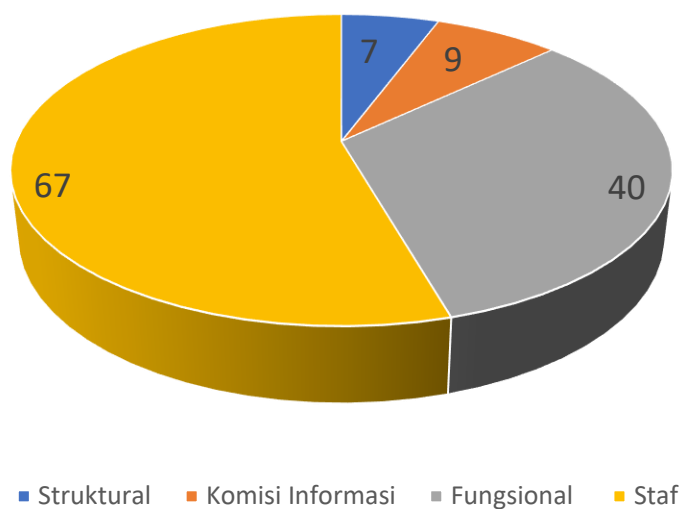


b. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan

Tabel 1.3 Distribusi Pegawai berdasarkan Jabatan dan Golongan

N o.	Jabatan / Eselon	Golongan				PPPK	Tenaga IT	Tenaga Ahli	Pegawai Outsourcing	Jumlah
		IV	III	II	I					
1.	Sruktural									
	- Eselon II/a	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Eselon III/a	5	-	-	-	-	-	-	-	5
	- Eselon IV/a	-	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Komisi Informasi	-	-	-	-	-	-	9	-	9
3.	Fungsional	-	19	2	-	19	-	-	-	40
4.	Staf	-	20	2	-	-	23	-	22	67
	Jumlah	6	40	4	-	19	23	9	22	123

Aparatur Diskominfo berdasarkan Jabatan

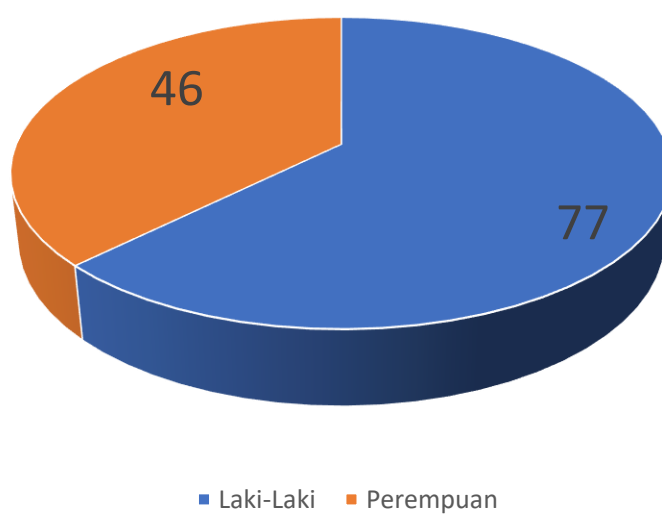


c. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

Tabel I.4 Distribusi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	77	62,61
2.	Perempuan	46	37,39
Jumlah		123	100

Aparatur Diskominfo Berdasarkan Jenis Kelamin

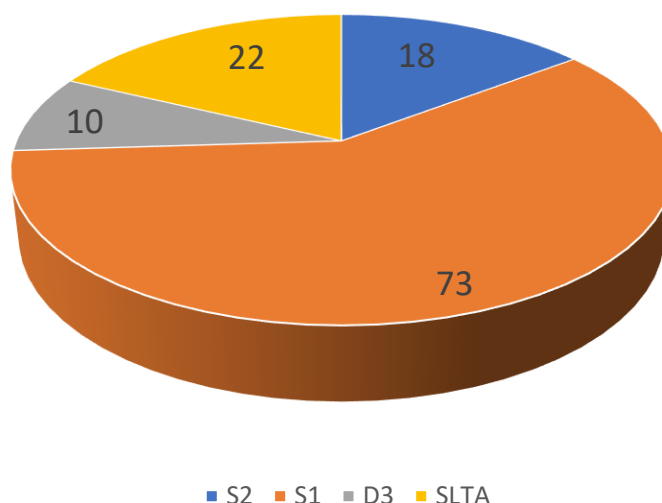


d. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Tabel I.5 Distribusi Pegawai berdasarkan Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	S2	18	14,63
2.	S1	73	59,35
3.	D3	10	8,13
4.	SLTA	22	17,89
Jumlah		123	100

Aparatur Diskominfo berdasarkan Jenjang Pendidikan



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa komposisi aparatur Diskominfo dari sisi jenis kelamin 62,61% adalah laki-laki dan 37,39% adalah perempuan. Dari segi pendidikan 18% S2, 73% S1, 10% D3, dan 22% SMA/SMK. Hal ini merupakan modal dasar bagi Diskominfo dalam mewujudkan target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya.

I.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Diskominfo Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang Latar Belakang, Gambaran Umum, Penghargaan, Kewenangan dan Data Umum Organisasi serta Sistematika Penulisan Laporan Kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan beberapa hal penting dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dari pembangunan yang dilaksanakan. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan. Rencana Strategis Diskominfo merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang diturunkan dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Gubernur Sumatera Barat yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kominfo, Persandian dan Statistik Sektorial yang bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat tahun 2021-2026, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tujuan antara lain:

1. Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Meningkatnya keterbukaan informasi;
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Adapun sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)
3. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektorial
4. Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah

5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Program, dan Target Kinerja Jangka Menengah

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	PROGRAM	Target Kinerja Sasaran tahun 20xx					
							21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE										
			Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE; 2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE; 3. Indeks Domain Manajemen SPBE; 4. Indeks Domain layanan SPBE.	Berdasarkan PermenpanRB 59/2020 dimana nilai bobot domain: - Kebijakan Internal SPBE 13% - Tata Kelola SPBE 25% - Manajemen SPBE 16,5% - Layanan SPBE 45,5% Indeks SPBE merupakan agregat dari nilai masing-masing domain	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
							3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
							3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
							3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
			Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Kemanan Informasi (KAMI) (%)	Jumlah nilai per area keamanan informasi/ Jumlah area penilaian	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	44	45	47	50	55	60
			Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan (%)	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah/ Jumlah Perangkat Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	50	60	70	80	90	100
				Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan (%)	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah/ Jumlah Perangkat Daerah		50	60	70	80	90	100
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik										
			Meningkatnya Penyebarluasan informasi kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah	Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi Terkait Kebijakan, Program Prioritas dan strategis Pemerintah (%)	Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemma lainnya/ Jumlah Penduduk	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		10	20	30	40	50

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	PROGRAM	Target Kinerja Sasaran tahun 20xx					
							21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja										
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Berdasarkan agregat bobot penilaian dari komponen yang dinilai: - Perencanaan kinerja 30% - Pengukuran kinerja 30% - Pelaporan kinerja 15% - Evaluasi internal 25%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	B	B	B	BB	BB	A
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi										
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (%)	Pengolahan Data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Per Responden dan Per Unsur Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		85	86	87	88	89

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Renstra Diskominfo Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka ditetapkanlah sasaran kinerja Diskominfo yang hendak dicapai pada tahun 2024, penetapan Perjanjian Kinerja 2024 memperhatikan realisasi capaian pada tahun 2023 (pada Pasal 10 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan bahwa “target kinerja dapat ditetapkan lebih rendah/ lebih tinggi dari target jika terjadi kondisi tertentu”) sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Target Perjanjian Kinerja 2024

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	
			PADA RENSTRA	PADA PK
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE;	3,4	3,40
		2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE;	3,4	3,80
		3. Indeks Domain Layanan SPBE;	3,4	4,26
		4. Indeks Domain Manajemen SPBE	3,4	2,60
2	Meningkatnya Kemanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	50	66%
3	Meningkatnya Pemanfaatan data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan	80%	80%
		Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan	80%	81%
4	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah	Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi Terkait Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah	30%	38,37%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB	BB (73)
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	87%	92%

Dasar penetapan target

Untuk mencapai target perjanjian kinerja tersebut dilaksanakan melalui Program dengan dukungan Anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program dan Anggaran 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	15.516.423.406	APBD
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	10.256.452.080	APBD
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	10.033.896.128	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	373.198.700	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	329.788.694	APBD
JUMLAH		36.509.759.008	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Metodologi : permendagri 86/2017, pergub 71/2020

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kinerja 2024				
			Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)	
						Atas Renstra	Atas PK
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 4	8 = 6 / 5
1	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,4	3,76	3,85	113,24	102,39
	- Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE;	3,4	3,4	3,7	108,82	108,82
		2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE;	3,4	3,8	3,8	111,76	100
		3. Indeks Domain Layanan SPBE;	3,4	4,26	4,26	125,29	100
		4. Indeks Domain Manajemen SPBE.	3,4	2,6	2,91	85,59	111,92
	- Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	50	66	81,86	163,72	124,03
	- Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan (%)	80	80	92,16	115,2	115,2
		Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan (%)	80	81	90,20	112,75	111,36
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	-	75,03	-	-
	- Meningkatnya Penyebarluasan informasi kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah	Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi Terkait Kebijakan, Program Prioritas dan strategis Pemerintah (%)	30	38,37	58,58	195,27	152,67
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB	BB	BB	-	100,56
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (%)	87	92	84	96,55	91,3

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kinerja 2024				
			Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)	
						Atas Renstra	Atas PK
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 4	8 = 6 / 5
	- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB	BB (73)	BB (73,42)	-	100,56
	- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (%)	87	92	84	96,55	91,3

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja tahun 2024 dihitung berdasarkan target PK 2024 dengan realisasi 2024. Capaian kinerja 4 (empat) indikator tujuan melebihi 100%, kecuali pada indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi tercapai 91,3%. Sedangkan 10 (sepuluh) indikator sasaran capaian kinerja adalah/melebihi 100% dari target PK kecuali pada indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi tercapai 91,3%.

Apabila dibandingkan realisasi 2024 dengan target renstra di tahun 2024, untuk tujuan Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diukur dengan indikator Indeks SPBE capaian kinerja adalah 113,24. Untuk tujuan Meningkatnya Keterbukaan Informasi yang diukur dengan indikator Keterbukaan Informasi Publik, tidak tersedia target kinerja pada dokumen Renstra, namun diperoleh realisasi sebesar 75,03 yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat. Pada tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien, indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi memiliki nilai capaian dibawah seratus persen atau tercapai 96,55%. Khusus indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tidak bisa diukur nilai capaian terhadap renstra karena tidak tersedia nilai nominal dari target tersebut.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target*	Realisasi	Capaian	Target**	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,3	3,75	113,64	3,76	3,85	102,39
	- Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE;	3,3	3,4	103,03	3,4	3,7	108,82
		2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE;	3,3	3,8	115,15	3,8	3,8	100
		3. Indeks Domain Layanan SPBE;	3,3	4,26	129,09	4,26	4,26	100

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target*	Realisasi	Capaian	Target**	Realisasi	Capaian
		4. Indeks Domain Manajemen SPBE.	3,3	2,55	77,27	2,6	2,91	111,92
	- Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Kemanan Informasi (KAMI)	47	65,58	139,53	66	81,86	124,03
	- Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan (%)	70	72,55	103,64	80	92,16	115,2
		Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan (%)	70	80,39	114,84	81	90,20	111,36
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	74,58	-	-	75,03	-
	- Meningkatnya Penyebarluasan informasi kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah	Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi Terkait Kebijakan, Program Prioritas dan strategis Pemerintah (%)	20	25,67	128,35	38,37	58,58	152,67
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B	BB	104,16	BB	BB	100,56
			(67)	(69,78)		(73)	(73,42)	
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (%)	86	91,65	106,56	92	84	91,3
	- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B (67)	BB (69,78)	104,16	BB (73)	BB (73,42)	100,56
	- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (%)	86	91,65	106,56	92	84	91,3

*) Target 2023 mengacu kepada target Renstra

**) Target 2024 disesuaikan dengan memperhatikan realisasi tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 secara umum dapat tercapai diatas 100% kecuali untuk indikator sasaran/tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi. Pada tahun 2023 indikator ini terealisasi 91,65% dan berdasarkan realisasi tersebut disepakati target tahun 2024 sebesar 92%. Namun, realisasi indikator ini hanya terealisasi 84% sehingga capaian kinerja tahun 2024 dibawah 100%.

Pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian target kinerja karena pada tahun 2023 rata-rata realisasi masing-masing indikator sudah melampaui target yang ditetapkan pada dokumen Renstra Diskominfo 2021-2026, kecuali pada indikator Indeks Domain Manajemen SPBE target diturunkan dari target Renstra akibat realisasi yang jauh dari target. Penyesuaian angka target ini diperkenankan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penyesuaian angkat target pada indikator ini berdampak capaian indikator Indeks Domain Manajemen SPBE di tahun 2024 tercapai diatas 100%, atau lebih baik bila dibandingkan dengan capaian di tahun 2023.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Renstra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi 2024	Kondisi Akhir Renstra 2026	Persentase Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6 = 4 / 5
1	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,85	3,6	106,94
	- Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE;	3,7	3,6	102,78
		2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE;	3,8	3,6	105,56
		3. Indeks Domain Layanan SPBE;	4,26	3,6	118,33
		4. Indeks Domain Manajemen SPBE.	2,91	3,6	80,83
	- Meningkatkan Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Kemanan Informasi (KAMI)	81,86	60	136,43
	- Meningkatkan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan (%)	92,16	100	92,16
		Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan (%)	90,20	100	90,20
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	75,03	-	-
	- Meningkatkan Penyebarluasan informasi kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah	Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi Terkait Kebijakan, Program Prioritas dan strategis Pemerintah (%)	58,58	50	117,16
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (73,42)	A	-
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (%)	84	89	
	- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (73,42)	A	-

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi 2024	Kondisi Akhir Renstra 2026	Persentase Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6 = 4 / 5
	- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (%)	84	89	94,38

Berdasarkan tabel diatas, kinerja Diskominfofik hingga tahun 2024 bila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026, capaian kinerja beberapa indikator sudah melampaui target yang direncanakan selama periode jangka menengah. Lima indikator sudah melampaui target antara lain: Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE; Indeks Domain Tata Kelola SPBE; Indeks Domain Layanan SPBE; Indeks Domain Manajemen SPBE; Indeks KAMI; dan Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi Terkait Kebijakan, Program Prioritas dan strategis Pemerintah. Tiga indikator belum mencapai target antara lain: Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan, Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan, dan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi. Satu indikator tidak bisa diukur persentase capaian kinerja terhadap target akhir perencanaan jangka menengah karena tidak tersedia nilai nominal pada Renstra 2021-2026.

Adapun faktor pendorong dan penghambat penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada matriks berikut:

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Alternatif Solusi
1	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE			
	- Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE; 2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE; 3. Indeks Domain Layanan SPBE; 4. Indeks Domain Manajemen SPBE.	- Adanya payung hukum dalam bentuk Perpres dan Perda SPBE - Ketersediaan Tenaga IT dan Pranata Komputer yang memadai - Dukungan dan komitmen dari pimpinan dan OPD terkait	- Evaluasi SPBE terkendala pengumpulan bukti dukung di tingkat OPD - OPD belum memahami layanan yang dimiliki sehingga terkendala dalam penyusunan proses bisnis - Belum semua domain SPBE terentry ke	- Mengintensifkan rapat koordinasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemprov - Peningkatan wawasan dan pengetahuan tenaga IT dan Pranata Komputer di bidang TIK

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Alternatif Solusi
				dalam SIA SPBE v2 - Sumber daya perangkat keras memerlukan pembaruan dan berbiaya tinggi	
	- Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Kemanan Informasi (KAMI)	- Tersedianya payung hukum hingga SOP terkait pengamanan informasi - Dukungan tenaga IT terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi persandian dan keamanan informasi	- Belum tersedianya anggaran pembinaan Tenaga Sandiman, Pengelola Siber dan Sandi dan Pembentukan Security Operation Center (SOC) beserta perangkatnya (Firewall) - Tingginya intensitas serangan siber pada situs dan aplikasi milik Pemprov	- Melatih 60 orang ASN Pemprov untuk menyusun persyaratan sertifikasi ISO SNI 27001 - Mengintensifkan kerjasama dengan BSSN dalam pengelolaan persandian dan keamanan informasi
	- Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan (%)	- Adanya komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan urusan statistik - Adanya regulasi dalam penyelenggaraan urusan statistik	- Dukungan anggaran kurang optimal - Data yang tidak update dan tidak konsisten - JF Statistisi pada setiap produsen OPD tidak tersedia, melekat sebagai tugas tambahan pada pemangku fungsi perencanaan OPD - SDM penyelenggara urusan Statistik di Diskominfo belum optimal dengan beban kerja	- Membentuk portal satu data dalam manajemen data statistik sektoral - Mengintensifkan kerjasama dengan mitra kerja yakni Bappeda dan BPS - Mengupayakan membentuk JF Statistisi di setiap OPD sebagai perpanjangan tangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral
		Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan (%)			
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik			
	- Meningkatnya Penyebarluasan informasi kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah	Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi Terkait Kebijakan, Program Prioritas dan strategis Pemerintah (%)	- Dukungan anggaran dalam pengelolaan keterbukaan informasi - Dukungan KI sebagai mitra kerja Dinas terutama	- Masih banyak masyarakat yang acuh terhadap informasi yang disampaikan - Pengelolaan informasi dan	- Mengoptimalkan komunikasi dan kerjasama dengan mitra kerja terutama insan pers baik cetak maupun daring dalam

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Alternatif Solusi
			dalam menunjang dan mendorong kinerja PPID dalam keterbukaan informasi publik	komunikasi publik cenderung berbiaya mahal	menyampaikan informasi kepada masyarakat
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD			
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (%)			
	- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	- Tersedianya dokumen perencanaan kinerja jangka pendek dan menengah - Perencanaan kinerja sudah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan dan selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai - Adanya SOP Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja	- Belum seluruh aparatur memahami tugas dan fungsi masing-masing - Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai sehingga tidak mempengaruhi terhadap perubahan budaya kinerja organisasi - Kebutuhan tenaga fungsional tertentu seperti Perencana, Analis Kebijakan, dll tidak tersedia berdampak beban tugas dan tanggung jawab tidak merata	- Membangun kesadaran kolektif pada aparatur terhadap tugas dan fungsi masing-masing serta kontribusi yang diberikan terhadap pencapaian target kinerja organisasi. - Memberikan reward kepada aparatur yang berkontribusi serta pembinaan kepada yang belum optimal - Mengusulkan penyempurnaan anjab abk Diskominfo untuk menampung kebutuhan SDM terutama pada formasi jabatan fungsional
	- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (%)	- Adanya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengumpulan data survey kepuasan layanan	- Belum optimalnya umpan balik responden terhadap kuesioner	- Mengintensifkan komunikasi dengan pengguna layanan

3.2. REALISASI KEUANGAN

Capaian kinerja program dan keuangan urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik, dan urusan Persandian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan 2024

No	Program/ Indikator	Target	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.15.516.423.406	Rp.12.553.968.402	80,91
	- Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah provinsi	100%	90,06%	90,06
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp.10.256.452.080	Rp.8.814.304.058	85,94
	- Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	30%	58,58%	195,27
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.10.033.896.128	Rp.9.296.046.755	92,65
	- Indeks SPBE (skala 1-5)	3,4	3,85	113,24
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.373.198.700	Rp.321.675.355	86,19
	- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	80%	90,2%	112,75
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp.329.788.694	Rp.295.562.610	89,62
	- Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	50%	81,86%	163,72
	Jumlah	Rp36.509.759.008	Rp.31.281.557.180	91,55

Pada tahun 2024 untuk melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik, dan urusan Persandian dialokasikan anggaran sebesar Rp.36.509.759.008,- melalui 5 program, 14 kegiatan dan 54 sub kegiatan. Target pelaksanaan program telah tercapai sebagaimana yang direncanakan dengan **realisasi keuangan 91,55% dan realisasi fisik 85,68%.**

3.2. CAPAIAN PELAKSANAAN RB GENERAL

Pada Tahun 2024, Diskominfo melakukan 3 (tiga) Kegiatan Utama (KU) antara lain:

1. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
2. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
3. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral

Adapun realisasi rencana aksi RB General yang dilaksanakan oleh Diskominfo adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Realisasi Capaian RB General

No	Kegiatan Utama	Indikator KU	Baseline 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3,18	3,75	3,76	3,85	102,39
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	-	-	2	3	150
2	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2	3	3	3	100
3	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	-	1,55	2,6	2,87	110,38

Berdasarkan tabel diatas, tiga Kegiatan Utama pelaksanaan RB General dapat dicapai sebesar/lebih dari 100%. KU Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sejak tahun 2024 dilaksanakan oleh Diskominfo dimana sebelumnya menjadi tanggung jawab Biro Organisasi Sekretariat Daerah.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Diskominfo pada Tahun 2024.

Proses penyusunan Laporan Kinerja terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Diskominfo Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Dalam pencapaian kinerja Diskominfo Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala.

Sesuai Renstra Tahun 2021-2026, Diskominfo Provinsi Sumatera Barat menetapkan 3 (tiga) indikator tujuan dan 10 (sepuluh) indikator sasaran yang diperjanjikan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target-target capaian per tahun dari tahun 2021 s/d 2026.

4.2. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Kinerja yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Diskominfo Provinsi Sumatera Barat, antara lain :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Diskominfo Provinsi Sumatera Barat;
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen Laporan Kinerja;
3. Peningkatan kinerja perlu dukungan SDM, sarana dan prasarana, serta anggaran yang memadai. Masih terdapat kebutuhan Jabatan Fungsional yang belum tersedia dalam

menunjang kinerja Diskominfo sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar beban kerja organisasi dapat terdistribusikan dalam kerangka matriks peran hasil.

4. Laporan Kinerja yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Diskominfo Provinsi Sumatera Barat, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dan laporan tahun berikutnya.